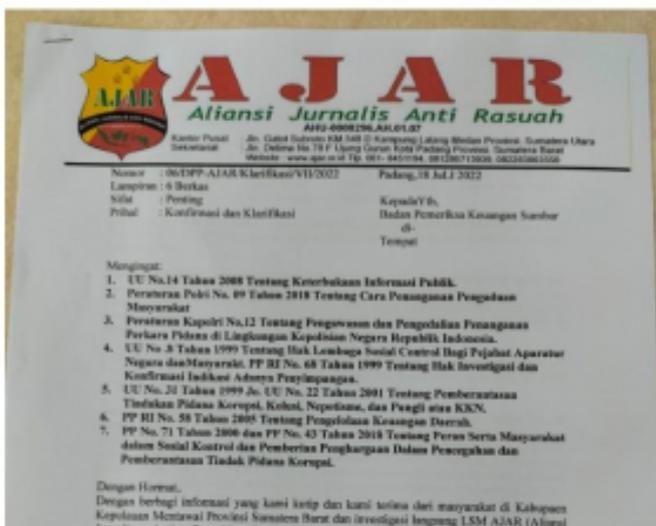


# HUMAS

## Dugaan Korupsi di Kabupaten Mentawai Tak Tersentu Hukum, Lsm AJAR Laporan ke Polda Sumbar

Afrizal - SUMBAR.HUMAS.CO.ID

Jul 20, 2022 - 11:44



PADANG, - Pada hari Senin, 20/07/2022 dengan didampingi oleh beberapa awak media Soni, S.H., C.Md., C.MPdI, C.CA Ketua LSM AJAR (Aliansi Jurnalis Anti

Rasuah) dan Pendiri LSM (Lembaga Investigasi Data Indikasi Korupsi) menyurati Kapolda Sumbar C/q Dir Krimsus serta Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang.

Surat yang ditujukan kepada Kapolda Sumbar di terima langsung oleh Ibuk Nelly pada bagian Sekertaris Umum (Setum) dan untuk Dir Krimsus di terima langsung oleh Ibuk Rani.



Soni menjelaskan kepada awak media kedatangannya ke Polda Sumbar dan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi serta mempertanyakan langsung beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Ya benar saya sebagai ketua Umum LSM AJAR dan Pendiri LSM Lidik Kasus mempertanyakan beberapa kasus dugaan korupsi yang pernah ditangani oleh Polda Sumbar dan atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumbar,”ungkap soni.

Beberapa kasus dugaan korupsi di Kepulauan Mentawai yang kami pertanyakan antara lain adalah:

Kasus Dugaan Markup Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Bambu senilai 12,4 jt USD di Tiga Desa yaitu: Matotonan, Madobag dan Saliguma di Siberut yang merupakan proyek gagal dalam pelaksanaannya.

Kasus Dugaan Korupsi APBD Rp 65 Miliar untuk Subsidi Pembelian BBM untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Bambu yang di manfaatkan menjadi tenaga Diesel atas temuan BPK RI adanya kerugian negara sebesar Rp 20 MiliarKasus Dugaan Markup Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Mentawai dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Tahun 2021 sebesar Rp 2,5 MiliarKasus Dugaan Korupsi Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun anggaran



oleh pihak Polda Sumbar agar dapat menjadi terang dan tidak kabur seperti saat sekarang ini.

“Segera tetapkan tersangka terhadap pelaku Kasus Dugaan Korupsi di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mangkarak dan tidak berjalan saat ini agar asumsi masyarakat terhadap penanganan kasus ini tidak negatif dan citra penegak hukum dalam menangani kasus ini dapat di ancungi jempol,” tutup soni...Bersambung.(\*\*)